



SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
BARITO KUALA**

**NOMOR : 700/018/BPPRD/2025
TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN KINERJA UTAMA (KU) PADA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BARITO
KUALA TAHUN 2025**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
BARITO KUALA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Inspektur Kabupaten Barito Kuala Nomor 700/088.f/LHE-SAKIP/BPPRD/IRBAN III/INSPT tanggal 08 Juli 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPPRD Tahun 2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b konsiderans ini, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Susunan Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan-Badan;
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala.
- Memperhatikan : Surat Inspektur Kabupaten Barito Kuala Nomor 700/088.f/LHE-SAKIP/BPPRD/IRBAN III/INSPT tanggal 08 Juli 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPPRD Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 dan Pohon Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 09 Mei 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,



DAHTIAR FAJAR, S.STP,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760519 199703 1 007

Lampiran : Surat Keputusan Kepala BPPRD
Kabupaten Barito Kuala Nomor :
018/BPPRD/2025 Tanggal Januari. Tentang
Penetapan Indikator Utama (IKU) dan
Kinerja Utama (KU) Pada Badan Pengelolaan
Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Barito Kuala Tahun 2025.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2025**

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	MAKNA IKU	ALASAN MEMILIH IKU	FORMULASI PERHITUNGAN IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Penerimaan Pajak Daerah	Nilai penerimaan pajak daerah merupakan total penerimaan daerah dari : 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan Umum 6. Pajak Parkir 7. Pajak Sarang Burung Walet 8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) 9. Pajak BPHTB	Sebagai Tupoksi dari BPPRD Kab Batola untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui sector Pajak Daerah	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah Tahun n	Kepala Badan	BPPRD
		Nilai Penerimaan Retribusi Daerah	RETRIBUSI JASA UMUM 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum 4. Retribusi Pelayanan Pasar RETRIBUSI JASA USAHA 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2. Retribusi Terminal 3. Retribusi Rumah Potong Hewan 4. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 5. Retribusi Penyeberangan di air 6. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	Sebagai Tupoksi dari BPPRD Kab Batola untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor Retribusi Daerah	Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah Tahun n	Kepala Badan	BPPRD

			7. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 1. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 2. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 3. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)				
2	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja BPPRD	Nilai Evaluasi SAKIP BPPRD	Nilai hasil evaluasi atas implementasi Sakip di BPPRD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Kuala	Karena nilai evaluasi sakip adalah nilai yang dapat menggambarkan akuntabilitas kinerja BPPRD	Nilai evaluasi Sakip BPPRD Tahun n	Kepala Badan	Inspektoral

Marabahan, 09 Mei 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,



DAHTIAR FAJAR, S.STP,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760519 199703 1 007

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

JABATAN	:	Kepala Badan
TUGAS	:	1. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup BPPRD. 2. Mengkoordinasikan dan mensinergikan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan bidang Pengembangan dan Pelayanan, Penagihan dan Pengendalian. 3. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup BPPRD. 4. Menyiapkan bahan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup BPPRD. 5. Mengendalikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup BPPRD. 6. Menyelia (Melakukan Supervisi) dan membina operasionalisasi pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, aset, akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup BPPRD. 7. Memfasilitasi kerja sama dinas dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, melalui kegiatan bidang-bidang Badan dalam pelaksanaan fasilitasi PBB,BPHTB,Serta Pajak Lainnya dan Retribusi,serta penyelenggaraan kesekretariatan badan. 8. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penilaian hasil kinerja secara periodik pada masing-masing bidang badan serta pelaksanaan kegiatan pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Aset, Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Lingkup BPPRD. 9. Menyelia (Melakukan Supervisi) Perencanaan, Pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada BPPRD. 10. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada BPPRD. 11. Mengkoordinasikan dan Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaiaan kinerja bidang-bidang dinas dan kesekretariatan dinas, sebagai suatu bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan BPPRD 12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
FUNGSI	:	2. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 3. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 4. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan adminmistrasi kepada seluruh unsur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Penghasil Pendapatan Asli Daerah. 5. Pengawasan dan Pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 6. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	MAKNA IKU	ALASAN MEMILIH IKU	FORMULASI PERHITUNGAN IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Penerimaan Pajak Daerah	Nilai penerimaan pajak daerah merupakan total penerimaan daerah dari : 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan Umum 6. Pajak Parkir 7. Pajak Sarang Burung Walet 8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) 9. Pajak BPHTB	Sebagai Tupoksi dari BPPRD Kab Batola untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui sector Pajak Daerah	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah Tahun n	Kepala Badan	BPPRD
		Nilai Penerimaan Retribusi Daerah	RETRIBUSI JASA UMUM 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum 4. Retribusi Pelayanan Pasar RETRIBUSI JASA USAHA 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2. Retribusi Terminal 3. Retribusi Rumah Potong Hewan 4. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 5. Retribusi Penyeberangan di air 6. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah 7. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 4. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Sebagai Tupoksi dari BPPRD Kab Batola untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui sector Retribusi Daerah	Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah Tahun n	Kepala Badan	BPPRD

			5. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 6. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)				
		Jumlah Potensi Objek Pajak yang dikelola		Sebagai Tupoksi dari BPPRD Kab Batola untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui sector Retribusi Daerah		Kepala Badan	BPPRD
		Jumlah Wajib Pajak yang dimutakhirkan		Sebagai Tupoksi dari BPPRD Kab Batola untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui sector Retribusi Daerah		Kepala Badan	BPPRD
	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja BPPRD	Nilai Evaluasi SAKIP BPPRD	Nilai hasil evaluasi atas implementasi Sakip di BPPRD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Kuala	Karena nilai evaluasi sakip adalah nilai yang dapat menggambarkan akuntabilitas kinerja BPPRD	Nilai evaluasi Sakip BPPRD Tahun n	Kepala Badan	Inspektorat

Marabahan, 09 Mei 2025

Mengetahui/menyetujui;  Kepala Badan DAHTIAR FAJAR, S.STP,M.Si NIP. 19760519 199703 1 007	Tim Perumus	
	1.	4.
	2.	5.
	3.	6.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON III
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	ALASAN MEMILIH IKU	FORMULASI PERHITUNGAN IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja	Nilai Evaluasi SAKIP dari komponen perencanaan kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemkab.	LHE Inspektorat	Sekretaris	Laporan Evaluasi SAKIP
	Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja	Nilai Evaluasi SAKIP dari komponen pengukuran kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemkab.	LHE Inspektorat	Sekretaris	Laporan Evaluasi SAKIP
	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja	Nilai Evaluasi SAKIP dari komponen pelaporan kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemkab.	LHE Inspektorat	Sekretaris	Laporan Evaluasi SAKIP
	Meningkatnya kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen akuntabilitas kinerja internal	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemkab.	LHE Inspektorat	Sekretaris	Laporan Evaluasi SAKIP
	Meningkatnya capaian atas perjanjian kinerja individu	Persentase perjanjian kinerja yang tercapai	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemkab.	$\frac{\text{Jumlah yang mencapai kinerja 100 \%}}{\text{Jumlah Pegawai}}$	Sekretaris	Laporan Tahunan
2	Meningkatnya Pengembangan Potensi dan Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Potensi Objek Pajak Daerah Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	$\frac{\text{Selisih realisasi Potensi dan Pelayanan Wajib Pajak tahun ini - realisasi Potensi dan Pelayanan Wajib Pajak tahun lalu}}{\text{realisasi Potensi dan Pelayanan Wajib Pajak tahun lalu}} \times 100 \%$	Kepala Bidang Pengembangan dan Pelayanan	BPPRD
3	Meningkatnya Kualitas Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian	Persentase Penyampaian Laporan Pendapatan yang Benar dan Tepat Waktu Persentase Penyampaian	Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	$\frac{\text{Selisih realisasi Laporan PAD dan Laporan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun ini - realisasi Laporan PAD dan Laporan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun lalu}}{\text{realisasi Laporan PAD dan Laporan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun lalu}} \times 100 \%$	Kepala Bidang Pengendalian	BPPRD

		Laporan Evaluasi dan Pengendalian yang Benar dan Tepat Waktu				
4	Meningkatnya Penagihan dan Pemeriksaan	Persentase Peningkatan Pembayaran Piutang Pajak Daerah Persentase Wajib Pajak Daerah yang taat pasca pembinaan dan pemeriksaan	Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Selisih realisasi Penagihan, Pembinaan dan Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun ini - realisasi Penagihan, Pembinaan dan Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun lalu _____ x 100 % realisasi Penagihan, Pembinaan dan Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun lalu	Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan	BPPRD

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON IV
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	ALASAN MEMILIH IKU	FORMULASI PERHITUNGAN IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Pengembangan Potensi dan Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Selisih realisasi Potensi Wajib Pajak tahun ini - realisasi Potensi Wajib Pajak tahun lalu $\frac{\text{Selisih}}{\text{realisasi Potensi Wajib Pajak tahun lalu}} \times 100 \%$	Kepala Bidang Pengembangan dan Pelayanan	BPPRD
2.	Meningkatnya Pengembangan Potensi dan Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Selisih realisasi Pelayanan Wajib Pajak tahun ini - realisasi Pelayanan Wajib Pajak tahun lalu $\frac{\text{Selisih}}{\text{realisasi Pelayanan Wajib Pajak tahun lalu}} \times 100 \%$	Kepala Bidang Pengembangan dan Pelayanan	BPPRD
3	Meningkatnya Kualitas Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Selisih realisasi Laporan PAD tahun ini - realisasi Laporan PAD tahun lalu $\frac{\text{Selisih}}{\text{realisasi Laporan PAD tahun lalu}} \times 100 \%$	Kepala Bidang Pengendalian	BPPRD
4	Meningkatnya Kualitas Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Selisih realisasi Laporan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun ini - realisasi Laporan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun lalu $\frac{\text{Selisih}}{\text{realisasi Laporan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun lalu}} \times 100 \%$	Kepala Bidang Pengendalian	BPPRD
5	Meningkatnya Penagihan dan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Selisih realisasi Penagihan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun ini - realisasi Penagihan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun lalu $\frac{\text{Selisih}}{\text{realisasi Penagihan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun lalu}} \times 100 \%$	Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan	BPPRD

6	Meningkatnya Penagihan dan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan, Pengelolaan Retribusi Daerah	Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Selisih realisasi Pembinaan dan Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun ini - realisasi Pembinaan dan Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun lalu x 100 % realisasi Pembinaan dan Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun lalu	Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan	BPPRD
---	--	---	--	--	---	-------